

## **BAB IV**

### **KEYAKINAN TRUMP AKAN POTENSI KERUGIAN AS DI TPP**

Dalam teori persepsi yang digunakan penulis sebagai landasan untuk menganalisis kasus ini, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan kedua pembuat kebijakan ini memiliki pandangan yang berbeda. Di dalam teori persepsi dijelaskan bahwa pembuat kebijakan menerima masukan (*input*) berupa informasi dan tersaring dalam sebuah sistem keyakinan yang akhirnya mengeluarkan hasil (*output*) berupa kebijakan. Sistem keyakinan sendiri terdiri dari serangkaian citra yang berbeda, bergantung pada setiap pembuat kebijakan. Rangkaian citra tersebut terbagi menjadi dua, yakni citra yang datang berdasarkan peristiwa yang telah terjadi; berasal dari pengalaman dan isinya berupa fakta, dan citra mengenai apa yang seharusnya terjadi; berasal dari nilai-nilai yang dianut, baik itu dari latar belakang maupun keyakinan para pembuat kebijakan. Serangkaian citra tersebut kemudian diinterpretasikan dengan informasi yang masuk melalui sistem keyakinan, yang kemudian di persepsi dan terbentuk menjadi sebuah keputusan. Citra yang berbeda akan membentuk keputusan yang berbeda pula dan ini menjadi faktor adanya perbedaan arah kebijakan antara Trump dengan Obama.

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai serangkaian citra yang menjadi alasan Trump sebagai Presiden AS untuk menghentikan dukungan terhadap *Trans-Pacific Partnership* pada tahun 2017. Didasari dengan adanya fakta bahwa beberapa hal yang merugikan pernah ada pada perjanjian sebelumnya, latar belakang kehidupan sebelum ia menjadi Presiden juga begitu berpengaruh pada rancangan kebijakan yang ia buat, sehingga menjadi faktor utama keputusan yang dikeluarkan sangat bertolak belakang dengan kebijakan yang begitu diperjuangkan oleh Obama ini. Dan sebagai pengantar mengenai peran penting seorang Presiden dalam pengambilan

kebijakan luar negeri di AS, penulis juga akan membahas mengenai proses pengambilan kebijakan luar negeri di AS.

### **A. Pengambilan Kebijakan Luar Negeri AS**

Dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat berbeda dengan pembuatan kebijakan dalam negeri. Di dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, AS lebih memperhatikan beberapa kunci yaitu dimana otoritas presiden lebih besar dan pengaruh kongres lebih terbatas. Otoritas serta kewenangan Kongres, Presiden, dan Mahkamah Agung ini telah ditentukan dalam Konstitusi AS. Pada pasal 1 ayat 1 tentang legislatif dijelaskan bahwa semua kuasa legislatif diberikan kepada Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari Senat dan *House of Representative* (DPR). Dalam Konstitusi pasal 1 disebutkan bahwa beberapa kuasa urusan luar negeri yang dimiliki oleh Kongres adalah mengatur perdagangan dengan negara asing, menyatakan perang, meningkatkan dan memfasilitasi tentara, dan membuat peraturan untuk angkatan darat serta angkatan laut.

Kongres juga memiliki wewenang yang luas untuk melakukan investigasi dalam kebijakan luar negeri atau masalah keamanan nasional tertentu, serta kekuatan untuk menciptakan, menghilangkan, atau merestrukturisasi lembaga eksekutif yang sering dilakukan setelah ada konflik besar atau krisis. Konstitusi memberikan Senat peran khusus dalam kebijakan luar negeri untuk memberikan saran kepada Presiden pada negosiasi, memberi izin kepada kesepakatan tersebut, dan menyetujui pengangkatan Presiden, Menteri Luar Negeri, pejabat dari Departemen Luar Negeri, Duta Besar, dan sebagainya. Selain itu, Kongres memiliki wewenang untuk "*lay and collect taxes*", menarik uang dari Departemen Keuangan, dan membuat semua hukum yang dinilai perlu dibuat dan tepat untuk mempengaruhi sebagian besar isu kebijakan luar negeri. Kongres juga berperan dalam mengawasi proses alokasi tahunan secara rinci mengenai anggaran dan program yang dilakukan AS dalam urusan luar negeri. Kongres menggunakan kekuatannya untuk membuat

undang-undang yang secara khusus membatasi kebebasan Presiden dalam mengurus kebijakan luar negeri.

Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa lembaga eksekutif dipimpin oleh Presiden yang menjabat sebagai kepala negara sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden merumuskan kebijakan luar negeri, mengawasi pelaksanaannya dan berupaya untuk mendapatkan sumber daya guna mendukung kebijakannya tersebut. Presiden juga mengatur serta menunjuk departemen dan agensi yang memainkan peran dalam proses kebijakan luar negeri. Dalam pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa Presiden juga menjabat sekaligus menjadi Panglima Angkatan Darat dan Angkatan Laut Amerika Serikat yang mana dengan adanya kuasa tersebut, Presiden dapat menggunakan kekuatan militer dan mengumpulkan intelijen asing. Ketika dihadapkan pada situasi nyata, Presiden akan mengeluarkan opininya secara tertulis dan ia dapat memberikan remisi serta pengampunan hukuman untuk berbagai kasus pelanggaran yang melawan Amerika Serikat. Presiden dinyatakan oleh Konstitusi untuk bertindak sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi militer, dan juga sekaligus menjadi kepala diplomat. Dalam kapasitas tersebut, Presiden bertanggung jawab atas pertahanan militer dan kepentingan nasional negara, termasuk mengumpulkan pasukan militer AS serta menjalankan diplomasi seperti negosiasi perjanjian. Lembaga eksekutif yang dipegang oleh Presiden memiliki hak untuk menolak menandatangani Undang-Undang. Presiden juga memiliki hak untuk memberitahu dan meminta legislasi dari Kongres, dan tentu saja sebagai Kepala Pemerintahan Presiden memiliki tugas untuk langsung berurusan dengan permasalahan atau isu-isu luar negeri. Konstitusi juga memberikan Presiden kuasa untuk membuat perjanjian dan untuk menerima serta menunjuk Duta Besar. Kuasa ini memberikan kekuasaan otoritas kepada Presiden untuk melakukan kebijakan luar negeri. Presiden bebas untuk bernegosiasi mengenai perjanjian yang akan dibuat, namun perjanjian tersebut harus diratifikasi oleh dua pertiga anggota Senat.

Sementara pada pasal 3 ayat 1 dalam Konstitusi AS dijelaskan bahwa kekuasaan peradilan Amerika Serikat akan dilimpahkan pada satu Mahkamah Agung. Namun, dibandingkan lembaga eksekutif dan legislatif, lembaga yudikatif memainkan peran terbatas dalam kebijakan luar negeri. Dalam Konstitusi pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa kuasa peradilan berlaku untuk semua kasus. Konstitusi memperluas kuasa peradilan untuk kasus yang berkaitan dengan perjanjian, Duta Besar, dan angkatan laut. Pada pasal 3 ayat 2, Konstitusi melimpahkan tanggung jawab pada pengadilan untuk meninjau semua kasus di bawah hukum dan perjanjian AS. Dalam kebijakan luar negeri, Pengadilan hanya memberikan batasan-batasan pada wewenang yang dimiliki oleh lembaga eksekutif dan legislatif.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, Presiden menjadi aktor yang sangat penting. Hal ini didukung juga oleh adanya akses informasi yang dimiliki dari berbagai pihak seperti CIA, NSC serta departemen luar negeri, sehingga informasi serta kondisi eksternal dari Amerika Serikat menjadi kunci bahwa dalam pengambilan kebijakan luar negeri otoritas Presiden lebih tinggi daripada Kongres.

## **B. Isi TPP *Agreement***

Seperti yang telah diketahui bahwa *The Trans-Pacific Partnership* (TPP) yang terdiri dari 12 negara di seluruh kawasan Asia Pasifik, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat dan Vietnam telah membentuk suatu kesepakatan yang bernama *TPP Agreement*. Teks dari *TPP Agreement* ini terdiri dari tiga puluh bab, yang mencakup tarif atas barang dan jasa, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), aturan *e-commerce*, standar tenaga kerja dan lingkungan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan banyak aspek lain dari perdagangan global. Untuk lebih jelasnya, rangkuman dari 30 bab *TPP Agreement* ini ada di dalam lampiran. Tujuan dari kesepakatan megaregional yang ambisius ini adalah untuk menciptakan kawasan ekonomi yang sepenuhnya terintegrasi dan

menetapkan aturan yang konsisten untuk investasi global. Bagi Obama, kesepakatan TPP merupakan sarana untuk memastikan bahwa "Amerika Serikat adalah yang menulis peraturan abad ini untuk ekonomi dunia, bukan Tiongkok maupun negara yang lain." (McBride & Chatzky, What Is the Trans-Pacific Partnership (TPP)?).

Dari 30 bab tersebut terdapat beberapa ketentuan utama, yaitu 1) Eliminasi atau pengurangan tarif. Kesepakatan itu menurunkan tarif dan hambatan perdagangan lainnya pada sejumlah besar barang, termasuk banyak produk manufaktur, tekstil dan pakaian jadi otomotif dan lainnya, dan komoditas pertanian, seperti daging, produk susu, dan biji-bijian. Beberapa perkiraan menempatkan pengurangan tarif total di antara anggota TPP pada 98 persen; 2) Liberalisasi perdagangan jasa. Pembatasan pada layanan lintas batas telah dihapus, dan aturan ditambahkan untuk memastikan bahwa bisnis yang menawarkan layanan di berbagai bidang termasuk ritel, komunikasi, hiburan, dan keuangan akan dilindungi dari diskriminasi; 3) Aturan investasi. Pasar dibuka untuk investasi asing di antara anggota, dan aturan ditambahkan untuk melindungi investor dari perlakuan tidak adil. Penyelesaian-penyelesaian sengketa investor-negara kontroversial (ISDS), yang memungkinkan investor untuk menuntut pemerintah tuan rumah menggunakan panel arbitrase internasional, dimasukkan; 4) Pedoman e-niaga. TPP adalah kesepakatan regional pertama yang memasukkan aturan komprehensif tentang perdagangan digital, yang akan memastikan aliran bebas informasi lintas batas, perlindungan privasi konsumen yang diamanatkan, dan kebijakan terlarang yang memaksa para investor untuk memindahkan *server* mereka dan fasilitas terkait lainnya ke negara tuan rumah; 5) Perlindungan kekayaan intelektual. Kesepakatan itu berisi ketentuan luas tentang IP, termasuk penegakan paten, ketentuan hak cipta yang diperpanjang, dan perlindungan untuk teknologi dan rahasia dagang. Ini termasuk perlindungan baru yang kontroversial untuk obat-obatan yang diresepkan, termasuk untuk kelas obat baru yang dikenal sebagai biologi, yang didorong oleh Amerika Serikat; 6) Standar tenaga kerja dan lingkungan. TPP melangkah

lebih jauh dari kesepakatan perdagangan sebelumnya (TPSEP) dalam melakukan anggota untuk memungkinkan pekerja membentuk serikat pekerja, melarang anak kerja paksa, memperbaiki kondisi tempat kerja, dan memperkuat perlindungan lingkungan; 7) Ketentuan penting lainnya termasuk peraturan tentang transparansi, pembatasan monopoli dan perusahaan milik negara, dan peraturan yang disederhanakan dimaksudkan untuk mempermudah usaha kecil untuk berdagang lintas batas (McBride & Chatzky, What Is the Trans-Pacific Partnership (TPP)?).

Ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas ternyata sudah mendapat perhatian dari Trump sejak lama, sebelum ia mencalonkan diri menjadi presiden. Oleh karena itu, sejak masa kampanye pemilihan presiden dilakukan secara terbuka Trump beberapa kali melontarkan pernyataan bahwa ia menentang keputusan pemerintah AS untuk bergabung dan menyetujui *Trans-Pacific Partnership Agreement*. Dalam salah satu pidato kampanye Trump di Monessen, Pennsylvania, ia menyampaikan rencananya untuk menulis ulang peraturan perdagangan global dan merevitalisasi ekonomi Amerika, termasuk juga pembahasan mengenai TPP. Trump menyampaikan bahwa terdapat defisit penciptaan pekerjaan di AS yang berjumlah lebih dari 20 juta pekerjaan yang terjadi sejak tahun 2002. Selain hilangnya pekerjaan, Trump juga menyebutkan mengenai upah rendah yang didapat oleh para pekerja AS. Di sisi lain, negara-negara anggota TPP bermain curang dan tidak sesuai dengan aturan, karena TPP *Agreement* akan memudahkan negara-negara selain AS yang merupakan pesaing perdagangan, untuk mengirimkan barang bersubsidi murah ke pasar Amerika Serikat. Sementara hasil produksi yang berasal dari AS akan sulit untuk diekspor ke negara-negara anggota TPP lainnya karena cenderung mendapat harga lebih tinggi.

Dari sekian ketentuan utama yang telah disebutkan di atas, Trump juga menaruh kekhawatiran lebih terhadap TPP *Agreement*, mengingat di dalam kesepakatan juga disebutkan bahwa TPP akan menghilangkan atau mengurangi hambatan tarif

dan non-tarif secara substansial kepada semua perdagangan barang dan jasa, dan mencakup spektrum penuh perdagangan, termasuk investasi barang dan jasa, dengan harapan dapat menciptakan peluang dan manfaat baru bagi bisnis, pekerja, dan konsumen.

Berbicara mengenai tarif, tarif merupakan sebutan bagi pajak atas produk yang dibuat di luar negeri. Secara teori, memajaki barang yang masuk ke negara itu berarti orang cenderung tidak membelinya karena harganya menjadi lebih mahal. Tujuannya adalah agar masyarakat membeli produk lokal yang lebih murah - meningkatkan ekonomi negara (BBC, 2018). Jika AS resmi menandatangani *TPP Agreement*, maka peraturan untuk memberlakukan pengurangan tarif harus dipatuhi. Produk yang dihasilkan dari negara anggota TPP akan dengan mudah masuk ke dalam pasar AS, sedangkan produk AS akan mengalami kesulitan untuk memasarkan produk kepada negara-negara anggota TPP. Sementara itu, pengurangan atau penghapusan tarif yang digunakan untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan dan investasi ini juga dibahas dalam *TPP Agreement* dan meliputi beberapa aspek perdagangan, seperti perdagangan barang, produk pertanian, tekstil dan pakaian jadi.

Yang pertama ada pada aspek perdagangan barang. Anggota TPP setuju untuk menghilangkan dan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif pada barang-barang industri, dan menghilangkan atau mengurangi tarif dan kebijakan pembatasan lainnya pada barang-barang pertanian. Secara teori, menghilangkan hambatan untuk berdagang dengan negara lain adalah hal yang baik. Salah satu nilai jual besar TPP adalah bahwa ia menuntut upah minimum yang harus ditetapkan oleh semua negara yang berpartisipasi. Ini sangat penting, karena biaya tenaga kerja telah menjadi faktor besar dalam pergeseran oleh perusahaan-perusahaan AS untuk memproduksi barang-barang mereka di luar negeri. Sayangnya, TPP tidak menetapkan standar untuk apa upah minimum itu seharusnya. Ini berarti bahwa negara-negara dapat memilih upah minimum yang, meskipun tampaknya merupakan peningkatan bagi pekerjanya, masih mustahil bagi perusahaan-perusahaan Amerika untuk

bersaing. Negara-negara ini akan sepenuhnya mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian dan masih memiliki keuntungan yang tidak dapat diatasi pada pabrikan A.S.

Pemotongan tarif khusus yang disetujui oleh Anggota TPP termasuk dalam jadwal yang mencakup semua barang, termasuk bidang manufaktur (Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement, 2015). Hal ini yang membuat Trump berpendapat bahwa pembahasan yang ada pada TPP *Agreement* mengenai pengurangan tarif akan mematikan produksi dan menghilangkan banyak lapangan pekerjaan terutama pada bidang manufaktur. Peraturan tarif yang diusulkan dalam TPP sebagian besar akan dirasakan oleh para pembuat mobil AS. Pengurangan tarif yang dibayar oleh Jepang ketika mereka mengangkut mobil dan truk mereka ke Amerika Serikat akan memungkinkan mereka untuk menurunkan harga mereka. Pabrikan mobil AS akan sulit bersaing dengan mobil-mobil buatan Jepang, dengan suku cadang buatan Tiongkok.

Berdasarkan sumber *Global Manufacturing Competitiveness Index*, pada tahun 2016 AS dan Jepang menduduki empat posisi teratas pada bidang manufaktur. Sementara Kanada masuk dalam posisi sepuluh teratas. Jepang dan Kanada yang juga tergabung dalam keanggotaan TPP dinilai akan dengan mudah dan bebas masuk ke dalam pasar AS karena mampu menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan AS.

Hal ini juga berlaku pada tekstil dan pakaian. Negara anggota TPP setuju untuk menghapuskan tarif pada tekstil dan pakaian jadi, industri yang merupakan kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi di beberapa pasar negara anggota TPP. Sebagian besar tarif akan segera dihapus, meskipun tarif pada beberapa produk sensitif akan dihapuskan dalam jangka waktu yang lebih lama sebagaimana disetujui oleh negara anggota. Bab ini juga mencakup aturan asal spesifik yang mengharuskan penggunaan benang dan kain dari wilayah TPP, yang akan mempromosikan rantai pasokan regional dan investasi di sektor ini, dengan mekanisme “daftar penawaran singkat” yang memungkinkan penggunaan benang dan kain tertentu tidak secara

luas tersedia di wilayah yang diatur. Dalam semua skenario yang disimulasikan, *output* manufaktur tahunan di Amerika Serikat akan turun sekitar \$ 846 juta - \$ 3.780 juta untuk tekstil dan \$ 1.154 juta - \$ 1.828 juta untuk pakaian jadi daripada sebaliknya (Lu, 2015).

Aturan "pengalihan benang" mungkin tidak secara substansial menguntungkan industri tekstil dan pakaian dalam negeri AS, karena dua alasan: 1) Hasil menunjukkan bahwa Vietnam lebih cenderung menggunakan tekstil Jepang daripada tekstil AS ketika aturan pengalihan benang berada di tempat. 2) Impor pakaian jadi AS dari Vietnam secara langsung bersaing dengan yang diimpor dari wilayah NAFTA dan CAFTA, pasar ekspor terbesar untuk benang dan kain buatan AS. Ketika pangsa pasar NAFTA dan CAFTA di pasar impor pakaian AS diambil oleh Vietnam, ekspor tekstil AS ke NAFTA dan CAFTA akan menurun, terlepas dari apakah Vietnam menggunakan tekstil buatan AS.

Hasil menunjukkan bahwa dibandingkan dengan aturan "pengalihan benang", pengembangan industri tekstil lokal Vietnam akan memiliki dampak yang lebih besar pada masa depan manufaktur tekstil dan pakaian dalam negeri AS. Khususnya, ketika Vietnam menjadi lebih mampu membuat input tekstil dengan sendirinya, tidak hanya permintaan keseluruhan Vietnam untuk tekstil impor akan menurun, tetapi juga ekspor pakaian jadi Vietnam akan menjadi lebih kompetitif dalam harga di AS dan juga pasar dunia.

Yang kedua, pada produk pertanian juga akan diberlakukan penghilangan atau pengurangan tarif dan kebijakan restriktif lainnya, yang diharapkan mampu meningkatkan perdagangan pertanian di wilayah tersebut, dan meningkatkan ketahanan pangan. Selain menghilangkan atau mengurangi tarif, negara anggota TPP setuju untuk mempromosikan reformasi kebijakan, termasuk dengan menghilangkan subsidi ekspor pertanian, bekerjasama dengan WTO untuk mengembangkan disiplin pada perusahaan perdagangan ekspor negara, kredit ekspor, dan membatasi jangka waktu yang diizinkan untuk pembatasan ekspor makanan (Summary of the Trans-Pacific

Partnership Agreement, 2015). Trump mengklaim bahwa itu akan merugikan pekerja buruh AS dan melemahkan perusahaan AS. Ia percaya bahwa rata-rata petani dan buruh telah kehilangan harapan, di mana tenaga kerja murah di negara berkembang seperti Tiongkok, Vietnam, dan Malaysia memiliki peluang lebih besar dibandingkan tenaga kerja AS untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak berupa banyaknya pekerjaan *low-skill* di AS, yang kemudian dilimpahkan ke luar negeri karena pemerintah menghentikan perusahaan dengan menuntut untuk menurunkan biaya produksi. Hasilnya adalah banyaknya pekerja *low-skill* yang merupakan tulang punggung industri di AS kehilangan pekerjaan. Akhirnya, AS harus berbagi pasar dengan negara-negara anggota TPP lainnya yang memiliki biaya produksi yang lebih rendah.

Tujuan dari terciptanya akses pasar yang komprehensif oleh *Trans-Pacific Partnership Agreement* dirasa Trump sebagai sebuah ancaman bagi AS. Selain kekhawatiran mengenai hilangnya pekerjaan untuk mengejar produksi yang murah, pengurangan tarif pada barang-barang perdagangan ini yang kemudian menjadi fokus bagi Trump karena produk AS akan mengalami kesulitan untuk memasarkan produk kepada negara-negara anggota TPP lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya negara-negara kompetitor yang juga menjadi anggota penandatanganan kesepakatan tersebut. Negara-negara yang menjadi kompetitor AS dinilai mampu bersaing dengan kualitas yang sama, namun menetapkan harga yang lebih rendah untuk hasil produksinya. Hal ini Berdasarkan alasan tersebut, Trump berpikir untuk segera mundur dan menarik seluruh dukungan yang telah diberikan oleh AS terhadap TPP. Trump menilai jika negara tidak dapat melindungi para pekerja dan perusahaan AS, maka tidak ada alasan bagi AS untuk bergabung dengan TPP.

### **C. Pengalaman Inefektivitas Perjanjian NAFTA**

NAFTA (*North American Free Trade Agreement*) merupakan sebuah perjanjian perdagangan bebas di wilayah Amerika Utara, yang menetapkan peraturan perdagangan dan investasi antara Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Sejak perjanjian tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1994, NAFTA telah secara sistematis menghilangkan sebagian besar hambatan tarif dan non-tarif untuk perdagangan bebas dan investasi antara ketiga negara NAFTA (NAFTAnow.org, 2013). Liberalisasi perdagangan di bidang pertanian, tekstil, dan manufaktur mobil menjadi fokus utama. Kesepakatan itu juga berusaha untuk melindungi kekayaan intelektual, membangun mekanisme penyelesaian perselisihan, dan, melalui perjanjian sampingan, menerapkan tenaga kerja dan perlindungan lingkungan. NAFTA secara fundamental membentuk kembali hubungan ekonomi Amerika Utara, mendorong integrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya antara ekonomi Kanada dan Amerika Serikat yang dikembangkan dan yang berkembang di Meksiko. Hal ini mendorong perdagangan regional menjadi lebih dari tiga kali lipat, dan investasi lintas batas antara ketiga negara juga tumbuh secara signifikan.

Namun, NAFTA tetap menjadi sasaran abadi dalam perdebatan yang lebih luas tentang perdagangan bebas. Ketika negosiasi untuk NAFTA dimulai pada tahun 1991, tujuan untuk ketiga negara adalah integrasi Meksiko dengan ekonomi upah tinggi yang sangat maju di Amerika Serikat dan Kanada. Harapannya adalah perdagangan yang lebih bebas akan membawa pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan mantap ke Meksiko, menyediakan lapangan kerja dan peluang baru bagi angkatan kerja yang terus bertambah dan mengecilkan migrasi ilegal dari Meksiko. Untuk Amerika Serikat dan Kanada, Meksiko dilihat sebagai pasar baru yang menjanjikan untuk ekspor dan sebagai lokasi investasi berbiaya rendah yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan AS dan Kanada.

Ross Perot, calon presiden AS kala itu berpendapat pada tahun 1992 bahwa liberalisasi perdagangan akan menyebabkan pekerjaan AS melarikan diri melintasi perbatasan. Namun, para

pendukung calon presiden lawan yaitu Bush dan Clinton membantah bahwa perjanjian itu akan menciptakan ratusan ribu pekerjaan baru setiap tahun, sementara Presiden Meksiko Carlos Salinas de Gortari melihatnya sebagai kesempatan untuk memodernisasi ekonomi Meksiko sehingga akan "mengekspor barang, bukan orang". NAFTA juga mengantar era baru perjanjian perdagangan bebas regional dan bilateral (FTA), yang telah menjamur ketika pembicaraan perdagangan global Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengalami stagnasi. NAFTA juga memelopori penggabungan ketentuan ketenagakerjaan dan lingkungan dalam perjanjian perdagangan AS, ketentuan yang telah menjadi semakin lebih komprehensif dalam FTA berikutnya.

Para ekonom sebagian besar setuju bahwa NAFTA memang telah memberikan manfaat bagi ekonomi Amerika Utara. Perdagangan regional meningkat tajam selama dua dekade pertama perjanjian tersebut, dari sekitar \$290 miliar pada tahun 1993 menjadi lebih dari \$1,1 triliun pada tahun 2016. Investasi lintas batas juga melonjak, dengan investasi asing langsung AS (FDI) di Meksiko meningkat dalam hal itu periode dari \$15 miliar hingga lebih dari \$ 100 miliar (COHA, 2012).

Perdebatan terus berlanjut mengenai warisan NAFTA pada pekerjaan dan upah, dengan beberapa pekerja dan industri menghadapi gangguan yang menyakitkan karena mereka kehilangan pangsa pasar karena meningkatnya persaingan, dan yang lainnya memperoleh dari peluang pasar baru yang diciptakan. Beberapa tahun sejak NAFTA diberlakukan, perdagangan AS dengan negara-negara tetangganya di Amerika Utara naik lebih dari tiga kali lipat, tumbuh lebih cepat daripada perdagangan AS dengan negara-negara lain di dunia. Kanada dan Meksiko adalah dua tujuan terbesar untuk ekspor AS, terhitung lebih dari sepertiga dari total. Sebagian besar perkiraan menyimpulkan bahwa kesepakatan tersebut memiliki dampak yang moderat tetapi positif terhadap PDB AS kurang dari 0,5 persen, atau penambahan total hingga \$ 80 miliar dolar AS bagi

perekonomian AS setelah penerapan penuh, atau beberapa miliar dolar pertumbuhan tambahan per tahun (COHA, 2012).

Kelebihan-kelebihan perdagangan semacam itu seringkali luput dari perhatian, karena sementara biayanya sangat terkonsentrasi di industri-industri tertentu seperti manufaktur mobil. Para pendukung NAFTA memperkirakan bahwa sekitar empat belas juta pekerjaan bergantung pada perdagangan dengan Kanada dan Meksiko, sementara hampir dua ratus ribu pekerjaan terkait ekspor yang dibuat setiap tahun oleh perjanjian itu membayar 15 hingga 20 persen lebih banyak daripada pekerjaan yang hilang.

Bagaimanapun, pendapat bahwa NAFTA harus disalahkan untuk kehilangan pekerjaan dan stagnasi upah di Amerika Serikat, didorong oleh persaingan upah rendah, perusahaan memindahkan produksi ke Meksiko untuk menurunkan biaya, dan defisit perdagangan yang melebar. Neraca perdagangan AS-Meksiko berayun dari surplus AS \$ 1,7 miliar pada tahun 1993 menjadi defisit \$ 54 miliar pada tahun 2014. Ekonom seperti Pusat Penelitian Ekonomi dan Kebijakan (CEPR) Dean Baker dan Institut Kebijakan Ekonomi berpendapat bahwa lonjakan impor ini menyebabkan kehilangan hingga 600.000 pekerjaan di AS selama dua dekade, meskipun mereka mengakui bahwa sebagian dari pertumbuhan impor ini kemungkinan akan terjadi bahkan tanpa NAFTA (McBride & Sergie, 2018).

Sektor otomotif AS kehilangan sekitar 350.000 pekerjaan sejak 1994, sementara lapangan kerja sektor otomotif Meksiko melonjak dari 120.000 menjadi 550.000 pekerja. Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, Amerika Serikat sebenarnya memiliki surplus perdagangan dengan Meksiko sekitar \$1 miliar USD pada tahun 1993 dan 1994, pada tahun 2007 defisit perdagangan yang terus meningkat dengan Meksiko telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa, pada \$74 miliar USD (COHA, 2012). Meskipun ekspor AS ke Meksiko sedikit meningkat di bawah NAFTA, AS mengalami masalah baru dimana sebagian besar ekspor AS ke Meksiko terdiri dari bagian-bagian mekanis, yang digunakan untuk merakit barang-barang di pabrik-pabrik Meksiko yang

kemudian diimpor kembali ke Amerika Serikat dengan harga murah, suatu proses yang dikenal sebagai sistem *maquiladora*. Ekspor seperti itu telah berlipat ganda sejak implementasi NAFTA, yang mengarah hanya pada lebih banyak impor dari Meksiko dan defisit perdagangan yang semakin mendalam. Kombinasi peningkatan impor dari Meksiko dan defisit perdagangan yang terus meningkat telah menyebabkan hilangnya pekerjaan, sebagian besar dalam posisi upah tinggi, *non-college-educated manufacturing*, di seluruh 50 negara bagian AS dan daerah Columbia. Ketika pekerja AS kemudian masuk kembali ke pasar kerja, mereka menemukan kesulitan mengamankan pekerjaan baru dan harus terima jika dibayar dengan upah yang sangat rendah. Pada Maret 2011, NAFTA menyebabkan hilangnya sekitar 700.000 pekerjaan saat produksi pindah ke Meksiko, NAFTA juga memperkuat kemampuan pengusaha AS untuk memaksa pekerja menerima upah dan tunjangan yang lebih rendah, serta membuka peluang bagi pekerja ilegal untuk masuk ke dalam lapangan kerja AS (Faux, 2013). Hilangnya pekerjaan yang begitu banyak dikarenakan perusahaan yang ada di Meksiko lebih mampu menurunkan biaya produksi dengan memberikan upah yang lebih rendah kepada para pekerjanya, dibandingkan perusahaan yang ada di AS.

Hal yang dicemaskan oleh Trump mengenai hilangnya pekerjaan yang akan ditimbulkan oleh TPP *Agreement* pernah terjadi dalam perjanjian NAFTA. Perjanjian ini pun sudah berjalan dalam kurun waktu dua puluh tahun antara Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat. Inefektivitas yang dialami dalam perjanjian NAFTA ini semakin memperkuat keinginan Trump untuk menarik diri dari keterlibatan AS dengan TPP, mengingat bahwa kedua negara yang tergabung dalam NAFTA juga merupakan mitra yang sama yang akan dihadapi oleh AS dalam TPP *Agreement*.

Selain adanya fakta dan pengalaman yang menjadi pemicu berupa isi kesepakatan dan pengalaman mengenai inefektivitas NAFTA, latar belakang serta nilai yang dianut oleh Trump sebagai pembuat kebijakan juga sangat berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan untuk menghentikan

dukungan terhadap TPP. Oleh karena itu, latar belakang dan sistem keyakinan yang dianut oleh Trump sebagai Presiden AS juga akan dibahas di dalam bab ini.

#### **D. Persepsi Individu Trump**

Trump lahir di New York, Amerika Serikat pada tanggal 14 Juni 1946 dengan nama lengkap Donald John Trump. Ayah Trump yang dikenal dengan Frederick Trump merupakan seorang pengembang bisnis properti *real estate* di beberapa wilayah di New York City, dan merupakan seorang pengusaha yang sukses. Mengikuti jejak ayahnya dalam bisnis pengembangan *real estate*, Donald bergabung dengan perusahaan keluarga, Elizabeth Trump & Son. Trump juga tidak tanggung untuk belajar mengembangkan jiwa wirausahawan yang dimiliki dengan mengikuti kelas di sebuah sekolah bisnis bernama Wharton School of Business. Setelah lulus pada tahun 1968, Trump memutuskan untuk melobi ayahnya agar lebih berani meminjam uang untuk membiayai ekspansi bisnis keluarga mereka. Keberanian serta tekad yang kuat menjadi awal mula kesuksesan bisnis Trump. Meskipun keberanian untuk memutuskan sesuatu yang beresiko tinggi ini tidak selalu berhasil, Trump tidak pernah takut untuk mencoba. Pada tahun 1971 ia berhasil mengendalikan perusahaan keluarga, yang ia ubah namanya menjadi The Trump Organization.

Sudah hampir 50 tahun Trump berkecimpung dalam dunia wirausaha. Keahlian bisnis Trump yang menonjol adalah menetapkan tujuan dan mengejar kesuksesan dengan tekad. Meskipun begitu, Trump tidak selalu berada di posisi mapan, ia berkali-kali menghadapi banyak rintangan hingga mengakibatkan kondisi keuangannya berkurang lebih dari 50 persen di tahun 1990. Pada tahun 1990, pasar *real estate* mengalami kemunduran. Hal ini berpengaruh pada berkurangnya pemasukan bagi perusahaan Donald Trump. Saat itu majalah Forbes melaporkan bahwa harta kekayaan Trump menurun pesat dari US\$ 1,7 miliar menjadi US\$ 500 juta (Husen, 2017). Berkali-kali pula pengamat bisnis memprediksi bahwa Trump Organization akan runtuh

dalam waktu dekat. Hal ini diperparah oleh jegalannya dari lawan bisnisnya. Namun, kondisi tersebut tidak berpengaruh, Trump Organization tetap berdiri tegak. Trump berusaha bangkit dari keterpurukan defisit yang hampir mencapai US\$ 900 juta. Pada tahun 1997, Trump menyatakan bahwa kondisi keuangannya sudah kembali pulih.

Dalam dunia bisnis, Trump dinilai sebagai ahli karena sudah mengalami banyak hal. Ia sangat paham apa pun yang berhubungan dengan investasi, memperluas usaha, dan menambah harta kekayaan. Sebab itu, ia memiliki beberapa prinsip yang telah terbukti mampu membawanya ke dalam kategori sukses dengan penuh perhitungan. Dikutip dari sumber buku biografi yang berjudul “Jatuh-bangun Donald Trump” karya Yanuardi Husen, Trump mempunyai tiga prinsip untuk menjadi sukses. Yang pertama adalah menetapkan standar yang tinggi dari pencapaian yang ingin diraih. Hal ini harus terus berulang. Bagi Trump, pebisnis harus memiliki tujuan dan tantangan yang lebih tinggi dari apa yang dimiliki saat ini. Yang kedua yaitu prinsip bahwa seorang pebisnis harus penuh gairah dan mengikuti kata hati serta naluri bisnisnya. Salah satu cara untuk terus memiliki gairah dalam berbisnis adalah dengan mencintai pekerjaan. Trump tidak menjadikan uang sebagai sumber gairahnya, oleh karena itu ia selalu melakukan apa yang ingin dilakukan. Berikut ini salah satu kutipan yang pernah dikatakan oleh Trump:

“Saya tidak melakukannya demi uang. Saya memiliki cukup uang daripada apa yang saya butuhkan. Saya melakukannya karena saya ingin melakukannya. Membuat kesepakatan adalah seni bagi saya. Orang lain melukis dengan indah di kanvas atau menulis puisi yang indah. Saya suka membuat kesepakatan, terutama kesepakatan besar. Inilah yang membuat saya bersemangat.” (Husen, 2017)

Yang ketiga yaitu mengenai kejujuran atau keberuntungan. Bagi Trump, keberuntungan itu ada dan sulit untuk dirumuskan. Trump mengakui beberapa keberuntungan yang ia miliki, salah satunya yaitu terlahir dari orang tua yang

hebat, negara yang hebat, dan kemampuan berpikir yang hebat. Namun, Trump juga tidak menampik bahwa keberuntungan itu bisa diciptakan atau dijemput dengan bekerja lebih keras, mempersiapkan segala kemungkinan baik dan buruk, dan dengan membangkitkan pola pikir yang positif.

Selain ketiga prinsip utama yang sudah disebutkan di atas, Donald Trump juga memiliki beberapa prinsip dalam hidup yang selalu ia pegang dan ia bagikan. Bahkan, berdasarkan kecintaanya untuk selalu membuat kesepakatan, Trump menuangkan pemikirannya tersebut dengan menulis sebuah buku yang berjudul "*The Art of Deal*". Dalam buku tersebut juga terdapat nilai-nilai yang dibawa oleh Trump dalam tiap pengambilan keputusannya dalam berbisnis. Yang pertama yaitu selalu berpikir besar. Salah satu kesalahan yang seringkali dilakukan oleh seorang pebisnis adalah berpikir kecil atau takut. Takut untuk sukses, takut untuk tegas terhadap diri sendiri dan orang lain, dan takut untuk jadi pemenang. Bagi Trump berpikir besar adalah kekuatan yang menghasilkan semua prestasinya.

Yang kedua yaitu dengan mengantisipasi dan memasang perlindungan diri ketika posisi sedang berada di atas. Trump tidak setuju dengan pemikiran berjudi, mempertaruhkan peluang yang tidak bisa terukur dengan pasti. Semua harus direncanakan dengan matang untuk jangka panjang, dan mempersiapkan jika suatu saat berda dalam situasi yang kurang menguntungkan.

Yang ketiga yaitu memaksimalkan pilihan yang ada. Menurut Trump, penting bagi pebisnis untuk menjadi fleksibel. Ia tidak pernah menghampiri kesepakatan dengan satu jalan saja karena tidak ada yang dapat menjanjikan bahwa jalan satu-satunya yang ia tempuh pasti berhasil. Trump selalu memiliki beberapa pilihan dan memaksimalkan tiap opsi yang ada sebagai perencanaan terbaik.

Yang keempat, tak hanya fleksibel dalam menentukan sebuah kesepakatan, mengenali pasar yang akan dihadapi oleh para pebisnis juga merupakan faktor yang penting. Trump bahkan lebih suka menggunakan jasa penelitian atau melakukan penelitian sendiri daripada mempekerjakan seorang konsultan, ahli statistik, atau kritikus. Hal ini akan memberikan banyak opsi

dalam membuat sebuah keputusan. Jika sudah mengenali pasar dan menyadari bahwa pasar yang akan dimasuki kurang baik maka berhentilah. Mengenali pasar juga membantu para pebisnis untuk melakukan tindakan pencegahan dari datangnya kerugian dan sikap proteksionis ini yang ditanamkan oleh Trump sebagai dasar untuk mengembangkan bisnisnya.

Yang kelima, penggunaan kekuasaan atau pengaruh yang dimiliki juga menjadi faktor yang tak kalah penting. Menurut Trump, untuk mendapat sebuah kesepakatan besar maka pebisnis harus mampu meyakinkan bahwa mereka adalah orang yang paling dibutuhkan oleh target bisnis mereka. Yang keenam, membuat para target bisnis atau *customer* tertarik pada apa yang pebisnis tawarkan. Trump mengakui alasan dibalik penampilannya yang sensasional dan kontroversial dalam setiap keputusan maupun pernyataannya, adalah untuk menarik minat media sehingga memancing perhatian bagi para target bisnis. Yang ketujuh yaitu melawan balik. Menurut Trump, sangat penting bagi seseorang untuk bersikap positif dan kooperatif. Namun, dalam satu waktu, penting pula untuk melawan ketika ada yang memperlakukan dengan tidak adil dan hanya memikirkan keuntungan untuk pihaknya.

Dari tujuh prinsip yang dianut Trump, terkandung nilai-nilai proteksionis yang ia diterapkan. Hal ini juga mencerminkan alasan mengapa Trump sangat senang untuk membuat kesepakatan. Negosiasi dan kesepakatan merupakan suatu langkah untuk menghindari dan melindungi diri dari kondisi yang kurang menguntungkan. Nilai-nilai serta prinsip yang dianut oleh Trump dalam mengembangkan bisnisnya ini, yang akhirnya mengantarkan Trump pada proyek-proyek besar yang melibatkan kerajaan kasino Donald Trump, perumahan, hotel, kompleks rekreasi, sepak bola, bahkan acara TV yang cukup terkenal. Ini menjadi sebuah pencapaian kesuksesan Trump dalam mengembangkan kerajaan bisnis Trump Organization.

Seolah tidak puas dengan kesuksesan di bidang bisnis dan hiburan, Trump mulai menjajaki tantangan baru di dunia politik AS. Dengan modal prinsip untuk selalu bermimpi besar, tak heran jika Trump mentargetkan dirinya untuk memenangkan

konvensi partai dan maju sebagai calon presiden pada tahun 2015. Sejak saat itu ia mulai mempromosikan dirinya dengan menawarkan janji kampanye berupa revitalisasi ekonomi. Partai Republik mengklaim bahwa pemilihan The Donald sebagai calon Presiden Amerika Serikat karena mereka ingin fokus pada isu ekonomi. Bagi mereka, tidak ada yang lebih krusial untuk dibenahi dari AS, selain memperbaiki kondisi ekonomi. Popularitas dan kekuatan AS belakangan mulai digusur oleh Tiongkok sebagai pesaing kekuatan ekonomi dunia. Dan kehadiran Trump menjadi solusi nyata atas kondisi yang dialami AS.

Dalam pidato kampanye pertama pada 21 Juli 2016 di Cleveland Trump menyatakan bahwa ia akan mulai mengamankan AS, menjaga lingkungan sekitar, mengawasi perbatasan, dan melindungi diri dari aksi terorisme. Hal ini tertuang dalam slogan pertamanya yaitu *“America First”*. Trump berjanji dengan visinya bahwa ia akan mengembalikan kejayaan Amerika sebagai negara nomor satu di dunia dan mengutamakan segala kepentingan nasional AS. Trump menolak ide globalisasi. Ia lebih suka jika rakyat Amerika memiliki kebanggaan sebagai negara adidaya dan mengembalikan kehormatan AS dengan tekadnya. Hal ini yang kemudian menimbulkan ide untuk mengusung slogan kampanye dan visinya, yaitu *“Make America Great Again”*. Menurut Trump, slogan ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan *common sense* dan dinilai efektif untuk meyakinkan publik dan bersama-sama membangun kembali Amerika Serikat.

Dalam masa kampanye juga dibahas mengenai pandangan Trump dan Hilary beserta strategi masing-masing kandidat dalam beberapa hal. Pembahasan mencakup pada strategi untuk memperbaiki ekonomi AS yang dimulai dari kebutuhan lapangan kerja hingga isu perdagangan internasional. Pada pembahasan mengenai lapangan kerja, lawan dari Trump menyatakan bahwa lapangan kerja di AS terus bertambah. Hilary bahkan memuji Obama yang mampu menciptakan lapangan kerja pasca krisis yang terjadi pada tahun 2008 dan ia akan terus mengembangkan. Di sisi lain Trump justru mengatakan bahwa

tingkat pengangguran di AS lebih besar dari data yang ada. Ia juga menyebutkan bahwa tingkat pengangguran di AS berada di kisaran 18-20% (Husen, 2017). Berdasarkan artikel yang ditulis *The Balance* mengenai rangkuman strategi kampanye Trump, disebutkan bahwa rencana Trump untuk menumbuhkan ekonomi adalah dengan menghilangkan pekerja *outsourcing* dan membawa pekerjaan kembali dari Jepang, Tiongkok, dan Meksiko.

Mengenai pajak, pihak lawan mentargetkan untuk menarik pajak lebih besar bagi warga yang memiliki aset properti US\$500 juta. Sedangkan Trump memiliki pandangan berbeda, ia bahkan berniat untuk mengurangi pajak bagi perusahaan kecil dan besar demi membangun ekonomi negara. Menurut Trump hal ini akan berdampak baik terhadap terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih besar. Trump berencana menurunkan pajak bagi perusahaan, yang semula 35% menjadi 15% (Husen, 2017).

Selain isu di atas, dibahas juga mengenai pandangan kedua kandidat mengenai *Trans-Pacific Partnership*. Hilary dan Trump memiliki pandangan yang sama. Keduanya tidak setuju sebab TPP dirancang untuk mengurangi hambatan dagang, termasuk tarif antar negara peserta. Hal ini dinilai akan merugikan bagi AS di masa depan. Hilary mengatakan bahwa dia tidak akan mendukung perjanjian perdagangan yang tidak menghasilkan pekerjaan, menaikkan upah atau melindungi keamanan nasional, tetapi dia juga menekankan perlunya terlibat dalam perdagangan dengan negara lain. Sementara itu, Trump berjanji akan mempersempit defisit perdagangan dengan menegosiasikan perjanjian perdagangan yang lebih baik, serta meninjau kembali perjanjian perdagangan yang sudah berjalan untuk transaksi perdagangan yang cerdas dan adil bagi AS.

Dalam salah satu pidato kampanye Trump di Monessen, Pennsylvania, ia juga menyampaikan rencananya untuk menulis ulang peraturan perdagangan global dan merevitalisasi ekonomi Amerika, termasuk juga pembahasan mengenai TPP. Berdasarkan data, Trump menyampaikan bahwa terdapat defisit penciptaan pekerjaan di AS yang berjumlah lebih dari 20 juta pekerjaan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang

lambat terjadi sejak tahun 2002. Selain hilangnya pekerjaan, Trump juga menyebutkan mengenai upah rendah yang didapat oleh para pekerja AS. Hal-hal di atas ditargetkan berkurang jika ia terpilih menjadi Presiden AS. Berikut ini merupakan kutipan dari pidato Trump:

*“The Trans-Pacific Partnership is the greatest danger yet. The TPP, as it is known, would be the death blow for American manufacturing. It would give up all of our economic leverage to an international commission that would put the interests of foreign countries above our own. It would further open our markets to aggressive currency cheaters — cheaters, that’s what they are, cheaters.*

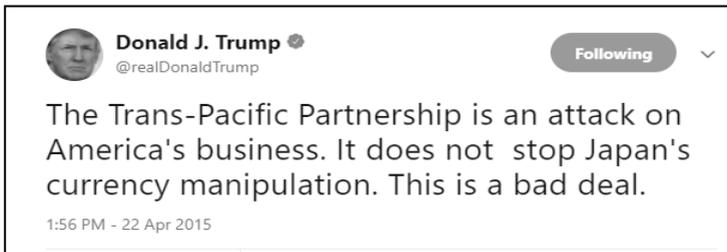
*They are not playing by the rules. They are cheating. It would make it easier for our trading competitors to ship cheap subsidized goods into United States markets, while allowing foreign countries to continue putting up barriers in front of our exports — which is what they do. It is very hard to export to their countries. They make it very difficult.”* (TIME STAFF, 2016)

Dalam kutipan pidato tersebut Trump menyatakan bahwa *Trans-Pacific Partnership* merupakan suatu ancaman besar bagi AS. Trump berpendapat bahwa pembahasan yang ada dalam negosiasi TPP akan mematikan produksi pada bidang manufaktur di AS. Trump juga menyebutkan bahwa *TPP Agreement* hanya akan menempatkan kepentingan negara-negara asing di atas kepentingan AS karena membuka AS sebagai pasar negara-negara anggota TPP. Bagi Trump, negara-negara TPP bermain curang dan tidak sesuai dengan aturan, karena *TPP Agreement* akan memudahkan negara-negara selain AS yang merupakan pesaing perdagangan, untuk mengirimkan barang bersubsidi murah ke pasar Amerika Serikat. Sementara hasil produksi yang berasal dari AS akan sulit untuk diekspor ke negara-negara

anggota TPP lainnya. Sehingga tidak ada alasan bagi AS untuk bergabung dengan TPP.

Rencana Trump mengenai kebijakan untuk mencabut dukungan AS terhadap TPP ketika kampanye juga sempat dilontarkan melalui beberapa pernyataan Trump di sosial media, yang tepatnya diunggah melalui akun Twitter pribadinya dengan nama pengguna *@realDonaldTrump*.

Gambar 4. 1 Postingan akun media sosial Twitter milik Trump pada April 2015

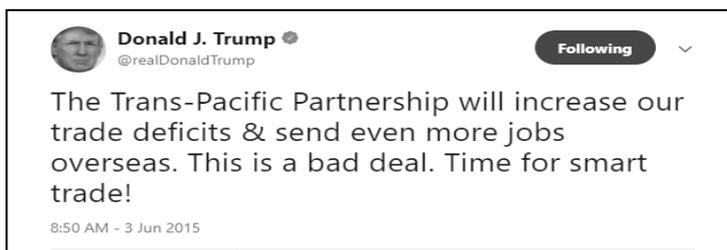


Sumber: <https://twitter.com/realdonaldtrump>

Dapat dilihat pada Gambar 4.1, Trump mengatakan bahwa TPP *Agreement* akan merugikan bisnis AS, khususnya perusahaan. Hal tersebut juga memicu hilangnya pekerjaan bagi para pekerja yang akan membuat masyarakat AS kehilangan pekerjaan dan menghadapi krisis. Jika TPP *Agreement* diresmikan maka perusahaan dan para pekarja AS akan terluka, dan kesepakatan perdagangan bebas ini akan membuat produk asing lebih murah bagi orang Amerika untuk dibeli. Trump juga memberikan catatan bahwa TPP akan memudahkan Jepang untuk mendevalusi mata uangnya, yang membuat eksportir Jepang lebih mudah bersaing dengan AS. Sedangkan yang dikhawatirkan adalah AS belum tentu dapat bersaing harga di pasar Jepang.

Sebagai seorang pengusaha, kepekaan Trump terhadap hal-hal yang menguntungkan maupun merugikan bagi dirinya sudah terasah melalui kebiasaan. Pada tahun yang sama, Trump kembali memposting pendapatnya mengenai TPP *Agreement*. Trump mengatakan bahwa TPP akan meningkatkan defisit bagi AS dan menciptakan lebih banyak pekerjaan ke luar negeri dibanding menciptakan pekerjaan ke dalam negeri. Trump menilai bahwa TPP akan menjadi sebuah transaksi yang buruk jika terus dilakukan, karena TPP hanya menguntungkan pihak lain dan merugikan AS. Pernyataan Trump dapat dilihat pada Gambar 4.2.

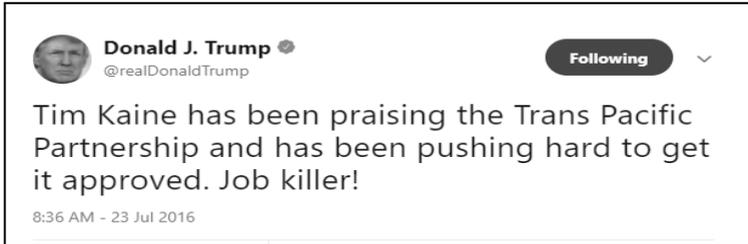
Gambar 4. 2 Postingan akun media sosial Twitter milik Trump pada Juni 2015



Sumber: <https://twitter.com/realdonaldtrump>

Isu mengenai TPP *Agreement* ini kemudian menjadi salah satu isu besar pada masa kampanye pemilihan Presiden. Dengan latar belakang partai yang berbeda, Trump dan Hilary Clinton yang merupakan lawan politiknya berlomba-lomba untuk menarik simpati masyarakat. Trump yang diusung oleh Partai Republik dan Clinton yang diusung oleh Partai Demokrat, membuat kedua kandidat ini memiliki visi misi dan arah rencana yang tidak sama. Tim Kaine, calon Wakil Presiden dari Clinton juga sempat mendapat sorotan dari Trump karena memuji TPP *Agreement* dan berupaya agar AS secara resmi bergabung dengan TPP yang dapat menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat AS. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 4.3.

Gambar 4. 3 Postingan akun media sosial Twitter milik Trump pada Juli 2016



Sumber: <https://twitter.com/realdonaldtrump>

Trump juga meyakini bahwa jika kemungkinan besar AS akan resmi bergabung dengan TPP jika Clinton yang terpilih menjadi Presiden AS berikutnya. Di sisi lain, Clinton juga menyatakan bahwa ia menentang TPP *Agreement*. Clinton bahkan mengakui jika ketika ia masih menjadi sekretaris negara, ia memandang TPP sebagai standar perjanjian perdagangan yang tinggi dan sebuah peluang yang baik bagi AS bagi masa depan AS. Namun, pendapatnya berubah setelah melihat realita di lapangan. Clinton juga menyatakan keprihatinannya atas kegagalan kesepakatan tersebut untuk menindak manipulasi mata uang, yang dia klaim “membunuh lapangan pekerjaan Amerika” (Abadi, 2016).

Dari penjelasan di atas maka tampak bahwa sikap Trump untuk menghentikan dukungan AS terhadap TPP dilatarbelakangi oleh persepsi yang dibangun berdasarkan nilai yang ia bawa. Sepak terjang yang dialami Trump selama menjadi pebisnis telah banyak mempengaruhi dan membentuk pola pikir, serta sudut pandang Trump dalam menentukan apapun, termasuk pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dari beberapa strategi yang terlihat kontras dengan yang diajukan oleh Hilary, di mana Trump begitu mengutamakan kepentingan domestik. Trump lebih fokus terhadap proteksi pada pekerja dan masa depan ekonomi AS. Selain itu, isi dari TPP *Agreement* khususnya mengenai pengurangan tarif bagi produk dari negara anggota TPP juga

dirasa tidak adil oleh Trump. Jika tetap diberlakukan, maka AS hanya akan menjadi pasar bagi negara-negara yang mampu menciptakan produk dengan harga yang lebih rendah. Nilai-nilai serta prinsipnya sebagai pebisnis ini yang mungkin diterapkan oleh Trump sebagai pertimbangan dalam memutuskan untuk menghentikan dukungan serta menarik mundur AS dalam keterlibatannya dengan *Trans-Pacific Partnership*.

Alasan Trump semakin kuat dengan adanya fakta bahwa dua negara yang terlibat yaitu Kanada dan Meksiko di dalam TPP *Agreement* seolah hanya memindahkan dari NAFTA menjadi TPP yang lebih luas cakupannya. TPP hanya akan memberikan kerugian bagi AS jika tidak mampu melindungi para pekerja dan perusahaan milik AS untuk tidak kehilangan pekerjaan dan penghasilan seperti yang terjadi pada perjanjian NAFTA. Hal ini tidak bisa diterima oleh Trump dengan alasan adanya ketidakefektifan cara kerja perjanjian NAFTA yang hanya akan memberikan nasib yang sama terhadap perekonomian AS jika TPP *Agreement* tetap dilakukan.